



Inovasi Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal di Kabupaten Sorong Selatan

Robert Christofel Wamaf¹, Zainal Fatah^{2*}, Amirul Mustofah³

¹⁻³Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr Soetomo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: rzainal@unitomo.ac.id

Abstract. This research intends to examine the empowerment of a culture-based creative economy in South Sorong Regency as a sustainable development strategy grounded in local traditions. The primary issue identified is the lack of competitiveness for local creative goods stemming from insufficient innovation, restricted market access, and inadequate infrastructure support. This study utilizes a qualitative descriptive method through comprehensive interviews, participatory observation, and documentation with creative economy participants, traditional authorities, and local government representatives. The results indicate that innovation in the creative economy of South Sorong is achieved by enhancing the skills of local entrepreneurs, safeguarding traditional cultural crafts like carving and weaving from West Papua, and utilizing digital technology for marketing products. The local government serves as a catalyst to foster cooperation between traditional communities, educational entities, and the private sector to create a thriving creative ecosystem. The conclusion emphasizes that innovation rooted in culture is crucial for strengthening the economic resilience of communities. The research suggests creating a regional center for the creative economy to serve as a cooperative space for training, cultural production, and promotion, aimed at enhancing market networks both nationally and internationally.

Keywords: Creative Economy; Empowerment; Innovation; Local Culture; South Sorong

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi inovasi dalam pemberdayaan ekonomi kreatif yang berlandaskan budaya lokal di Kabupaten Sorong Selatan sebagai strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berakar pada nilai-nilai kearifan lokal. Masalah utama yang dihadapi adalah minimnya daya saing produk kreatif daerah disebabkan oleh keterbatasan inovasi, akses pasar, dan dukungan infrastruktur. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta dokumentasi terhadap pelaku ekonomi kreatif, tokoh adat, dan pejabat pemerintah daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa inovasi ekonomi kreatif di Sorong Selatan direalisasikan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal, pelestarian budaya tradisional seperti seni ukir dan tenun khas Papua Barat Daya, serta penggunaan teknologi digital untuk memasarkan produk. Pemerintah daerah berfungsi sebagai penghubung dalam menjalin kerja sama antara komunitas adat, institusi pendidikan, dan sektor swasta guna menciptakan ekosistem kreatif yang efisien. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa inovasi yang mengandalkan budaya lokal dapat menjadi dasar penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Rekomendasi yang disampaikan adalah pentingnya mendirikan pusat ekonomi kreatif di daerah sebagai sarana kolaborasi, pelatihan, serta promosi produk budaya lokal guna memperluas jaringan pasar hingga skala nasional dan internasional.

Kata Kunci: Budaya Lokal; Ekonomi Kreatif; Inovasi; Pemberdayaan; Sorong Selatan

1. LATAR BELAKANG

Ekonomi kreatif kini berperan sebagai salah satu pilar utama dalam memperkuat daya saing daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah era disruptif digital dan globalisasi ekonomi yang semakin pesat. Di Indonesia, sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang dalam beberapa tahun terakhir terus tumbuh seiring berkembangnya inovasi yang berbasis kearifan lokal dan kemajuan teknologi (Bernika & Monika, 2024). Pemerintah pusat dan daerah berusaha menggabungkan potensi lokal, kebudayaan, serta kreativitas masyarakat sebagai strategi untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada aspek komersil, tetapi juga pada pelestarian nilai-nilai budaya. Dalam konteks ini,

ekonomi kreatif tidak sekadar menjadi sumber pendapatan alternatif, tetapi juga wadah penguatan identitas budaya dan keterlibatan sosial masyarakat dalam pembangunan (Khumair & Yazid, 2025).

Kabupaten Sorong Selatan, sebagai salah satu daerah di Provinsi Papua Barat Daya, memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam yang melimpah, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi basis ekonomi kreatif lokal. Berbagai bentuk ekspresi budaya seperti seni pahat tradisional, tarian lokal, kerajinan dari bahan alami, serta produk makanan khas daerah memperlihatkan potensi ekonomi yang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Walaupun demikian, pertumbuhan ekonomi kreatif di Sorong Selatan masih menghadapi beragam hambatan seperti kurangnya infrastruktur, rendahnya kemampuan kewirausahaan masyarakat, terbatasnya akses terhadap teknologi digital, serta dukungan kelembagaan yang tidak memadai (Kaliele et al., 2022; Sanuri, 2020). Akibatnya, nilai tambah ekonomi produk budaya lokal menjadi rendah dan ketergantungan terhadap dukungan eksternal meningkat tanpa adanya inovasi yang terencana.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah setempat mulai meluncurkan berbagai program pemberdayaan yang berfokus pada budaya lokal, termasuk pelatihan kewirausahaan kreatif, pembentukan komunitas ekonomi kreatif, serta kerja sama dengan institusi pendidikan dan sektor swasta. Program-program tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan memperlihatkan adanya perbedaan antara kebijakan dan realisasi, khususnya dalam hal inovasi dan penguatan institusi. Tantangan lain muncul akibat rendahnya penerapan teknologi digital oleh pelaku ekonomi kreatif lokal yang mayoritas masih bergantung pada metode produksi tradisional dan pemasaran konvensional (Lermating et al., 2025). Karena itu, diperlukan pendekatan kreatif yang dapat memadukan nilai-nilai budaya setempat dengan strategi pemberdayaan ekonomi yang responsif terhadap perubahan zaman.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggabungan budaya lokal dalam ekonomi kreatif mampu meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, serta memperkuat identitas daerah dalam menghadapi persaingan global (Lestari et al., 2022; Maruapey et al., 2023; Syaifuddin & Umam, 2022). Namun, banyak penelitian masih lebih mengutamakan kawasan perkotaan atau tempat dengan akses infrastruktur yang baik, sementara analisis mengenai inovasi ekonomi kreatif berbasis budaya di bagian timur Indonesia, terutama Sorong Selatan, masih sangat minim. Keterbatasan ini mengindikasikan adanya celah penelitian dalam memahami cara nilai-nilai budaya lokal dapat dimanfaatkan melalui inovasi dan kolaborasi lintas pihak demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk memenuhi celah tersebut dengan mengkaji pola-pola inovasi yang timbul dari interaksi antara pemerintah daerah, masyarakat budaya, dan pelaku ekonomi setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara inovasi dalam pemberdayaan ekonomi kreatif yang berlandaskan budaya lokal di Kabupaten Sorong Selatan dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi guna mendukung peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang mendukung dan menghalangi inovasi, serta menganalisis bentuk kerja sama antara pemerintah, komunitas budaya, dan pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan model pemberdayaan yang berkelanjutan. Melalui kajian ini diharapkan dapat dicapai pemahaman menyeluruh tentang strategi inovasi yang efisien dalam konteks lokal Sorong Selatan, sehingga dapat menjadi acuan bagi daerah lain dalam meningkatkan ekonomi kreatif yang berlandaskan budaya dan mampu bersaing di skala nasional maupun global.

2. KAJIAN TEORITIS

Pembangunan ekonomi kreatif yang berlandaskan budaya lokal membutuhkan kerangka teori yang mengintegrasikan aspek ekonomi, budaya, dan pengelolaan (Masri, 2025); dari segi ekonomi, pendekatan ekonomi kreatif menempatkan potensi produk budaya dan ekspresi lokal sebagai komoditas bernilai tambah yang dapat mempercepat pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, tetapi untuk mewujudkannya dibutuhkan pemahaman tentang cara kreativitas lokal diubah menjadi nilai ekonomi melalui inovasi produk, desain, dan pemasaran yang sesuai dengan pasar modern. Literatur terkini menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif di Indonesia mengalami dinamika signifikan setelah pandemi dan tetap menjadi sumber penghasilan penting bagi penyerapan tenaga kerja serta kontribusi terhadap PDB (Kusumaningrum et al., 2024; Nidarmawati, 2025; Rosyadi et al., 2022). Oleh karena itu, strategi pengembangan perlu fokus pada peningkatan kemampuan usaha kreatif skala mikro dan menengah serta mekanisme pendukung seperti akses pasar, pembiayaan mikro, dan fasilitasi sertifikasi demi meningkatkan daya saing produk budaya.

Hubungan antara budaya lokal dan kewirausahaan kreatif dapat diuraikan melalui gagasan tentang kewirausahaan budaya yang menyoroti kontribusi agen lokal seperti seniman, pengrajin, serta komunitas adat dalam menemukan, menjaga, dan memasarkan aset budaya (Mahardhani, 2024). Pendekatan ini memosisikan budaya bukan hanya sebagai elemen dalam produksi tetapi juga sebagai proposisi nilai yang khas (*unique selling proposition*) yang membedakan produk lokal di pasar yang lebih luas (Song et al., 2018). Di wilayah seperti

Sorong Selatan, teori ini penting karena memerlukan pendekatan pemberdayaan yang peka terhadap kearifan lokal, menghargai hak masyarakat adat atas pengetahuan tradisional, serta menciptakan model bisnis yang mengintegrasikan praktik tradisional dengan desain produk serta pemasaran digital yang profesional, agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara setara oleh komunitas.

Keberhasilan inovasi pemberdayaan yang berlandaskan budaya lokal sangat bergantung pada model pengelolaan yang kolaboratif (*collaborative / network governance*) (Mahardhani, 2023), di mana pemerintah daerah, komunitas adat, pelaku industri kreatif, sektor pendidikan, dan pelaku pasar berkolaborasi dalam jaringan yang sinergis. Literatur mengenai pemerintahan kolaboratif mengindikasikan bahwa forum diskusi, kesepakatan peran (MoU), dan penghubung jaringan dapat mengatasi ego sektoral dan meningkatkan koordinasi program pemberdayaan serta pelestarian budaya (Dushkova & Ivlieva, 2024; Emerson et al., 2012; Widiawati et al., 2023). Dalam pelaksanaannya, model jaringan ini memungkinkan distribusi tanggung jawab seperti pemerintah menyediakan regulasi dan akses pasar, institusi pendidikan mendukung riset dan pengembangan produk, sedangkan komunitas melakukan produksi yang berlandaskan kearifan lokal sehingga inovasi bersifat inkremental dan berkelanjutan. Penelitian terkini juga menyoroti pentingnya legitimasi sosial dan kepercayaan antar para pelaku sebagai modal utama untuk kolaborasi semacam ini (Huybrechts & Nicholls, 2013; Mahardhani et al., 2021).

Aspek kapasitas lembaga dan tenaga kerja menjadi dasar praktis dalam merealisasikan inovasi ekonomi kreatif yang berlandaskan budaya; teori kapasitas menegaskan signifikansi program pembangunan kapasitas bertahap mulai dari literasi digital, keterampilan desain dan pengemasan, hingga manajemen keuangan untuk usaha kecil serta pembentukan unit pendamping lokal yang dapat memberikan bantuan berkelanjutan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa tanpa dukungan untuk kapasitas aktor lokal, intervensi berbasis proyek cenderung bersifat sementara dan sulit untuk menghasilkan dampak transformatif (Putra, 2023). Sehingga, pendekatan pemberdayaan yang berhasil mengintegrasikan pelatihan teknis, bimbingan bisnis, dan akses ke jaringan pemasaran digital untuk mengonversi produk budaya menjadi komoditas bernilai tinggi yang dapat memasuki pasar regional dan nasional.

Pada akhirnya, aspek keberlanjutan dan etika dalam inovasi budaya tidak dapat diabaikan: teori pembangunan berkelanjutan dan literatur mengenai pemberdayaan komunitas menekankan bahwa semua intervensi harus menghargai hak atas sumber daya budaya, memastikan distribusi manfaat yang adil, serta melestarikan lingkungan dan warisan budaya. Pendekatan yang berfokus pada komunitas yang melibatkan partisipasi dalam perencanaan,

pemantauan, dan evaluasi meningkatkan akuntabilitas sosial serta legitimasi program. Di samping itu, penerapan teknologi digital untuk promosi dan pencatatan harus diimbangi dengan kebijakan perlindungan hak kekayaan intelektual tradisional serta pengaturan data komunitas supaya inovasi tidak berakhir pada eksploitasi budaya. Dengan dasar teori kombinasi ini, penelitian dapat menyusun analisis yang menjelaskan bagaimana inovasi pemberdayaan ekonomi kreatif yang berfokus pada budaya lokal di Sorong Selatan dapat dirancang, dilaksanakan, dan distandarisasi agar efektif, adil, dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan model penelitian studi kasus deskriptif yang menitikberatkan pada inovasi pemberdayaan ekonomi kreatif yang berlandaskan budaya lokal di Kabupaten Sorong Selatan, untuk memahami secara mendalam tentang strategi, proses, dan dampak sosial ekonomi dari program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta komunitas budaya setempat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi makna, dinamika interaksi, serta praktik sosial yang tidak dapat diukur dengan angka, melainkan dipahami lewat interpretasi mendalam terhadap pengalaman aktor lokal (Pahleviannur et al., 2022). Penelitian ini melibatkan sejumlah informan kunci yang dipilih secara sengaja, mencakup pejabat dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Koperasi dan UKM, pelaku usaha kreatif lokal seperti pengrajin noken, pembuat ukiran kayu khas Papua Barat, pengelola sanggar seni, tokoh adat, serta akademisi dan lembaga yang mendampingi masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif di pusat-pusat ekonomi kreatif dan lokasi kegiatan budaya, serta analisis dokumen kebijakan daerah, laporan kegiatan pemberdayaan, dan dokumen rencana strategis pemerintah daerah. Keabsahan data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta pengecekan oleh peserta untuk memastikan kebenaran interpretasi hasil wawancara. Analisis data dilaksanakan secara interaktif dengan menggunakan model Huberman & Miles (2012) yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang memusatkan perhatian pada pengenalan pola inovasi, jenis kolaborasi antaraktor, serta integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam strategi pemberdayaan ekonomi kreatif yang berfokus pada keberlanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kebijakan dan Dukungan Pemerintah terhadap Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah menempatkan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan dalam rencana pembangunan daerah setelah pandemi. Ini tercermin dalam integrasi sektor budaya dan pariwisata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020–2025 yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan ekonomi yang berfokus pada lokal. Dukungan dari pemerintah direalisasikan lewat pembentukan unit kerja antar sektor antara Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi dan UKM yang berfungsi dalam memberikan pelatihan, akses pembiayaan, serta fasilitasi promosi untuk pelaku ekonomi kreatif. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan itu tetap menghadapi hambatan dalam koordinasi dan kekurangan tenaga kerja yang sepenuhnya memahami karakter budaya lokal.

Menurut wawancara dengan pejabat Dinas Pariwisata, strategi penguatan diarahkan pada revitalisasi produk yang berlandaskan warisan budaya seperti kerajinan noken, batik Papua, ukiran kayu, dan kuliner tradisional. Pemerintah menyediakan kesempatan untuk kolaborasi antar lembaga melalui program *creative hub* yang berperan sebagai tempat pelatihan, inkubasi usaha, serta pameran produk masyarakat. Namun dalam praktiknya, pengelolaan *creative hub* ini belum efektif karena minimnya sistem pemantauan dan keterbatasan dana operasional. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang efektif memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan agar inovasi ekonomi kreatif tidak terhenti di level proyek sementara.

Temuan ini sejalan dengan teori *collaborative governance* yang diajukan oleh Ansell & Gash dalam Mahardhani (2023), yang menekankan peran sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pelaksanaan kebijakan publik yang rumit seperti pengembangan ekonomi kreatif. Di Sorong Selatan, kolaborasi itu masih baru dimulai, sebab partisipasi masyarakat adat dan pelaku lokal belum sepenuhnya terlibat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan. Keikutsertaan mereka lebih sering terlihat dalam bentuk pelaksanaan teknis, bukan dalam pengembangan strategi.

Di samping itu, adanya peraturan seperti Peraturan Bupati mengenai Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya telah memberikan dasar hukum yang kokoh, tetapi pelaksanaannya masih terfokus pada aspek administratif formal. Pemerintah daerah biasanya lebih fokus pada acara seremonial seperti festival budaya tahunan tanpa memaksimalkan potensi ekonomi dari kegiatan tersebut. Dalam teori inovasi kebijakan publik yang diuraikan oleh Osborne & Brown

dalam Sururi (2016), terdapat kesenjangan kebijakan antara gagasan dan realisasi, di mana kebijakan belum sepenuhnya mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Masyarakat lokal yang dijadikan narasumber menganggap bahwa kebijakan pemerintah telah mulai memperhatikan potensi ekonomi budaya, namun belum menunjukkan dampak signifikan pada peningkatan pendapatan keluarga. Bantuan pelatihan dan modal usaha masih terpusat pada kelompok yang memiliki koneksi dengan pemerintah, sedangkan pelaku mikro di desa-desa terpencil sering kali diabaikan. Hasil ini menekankan pentingnya distribusi akses ke program pemberdayaan agar inklusivitas menjadi nilai utama dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif.

Oleh karena itu, dapat disampaikan bahwa meskipun kebijakan daerah Sorong Selatan telah mengindikasikan langkah yang maju dalam mendukung ekonomi kreatif yang berlandaskan budaya lokal, efektivitasnya tetap terhambat oleh tantangan koordinasi, kapasitas lembaga, dan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan, diperlukan strategi yang fokus pada kolaborasi horizontal antara komunitas budaya, sektor swasta, dan pemerintah daerah secara berkesinambungan.

Inovasi dan Adaptasi Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Penguatan Identitas Budaya

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku ekonomi kreatif di Sorong Selatan telah melaksanakan berbagai inovasi untuk mengembangkan produk yang berlandaskan budaya lokal. Contohnya, pengrajin noken dan pembuat ukiran kayu memadukan pola tradisional dengan rancangan modern untuk menarik perhatian pasar generasi muda dan pelancong. Inovasi ini merupakan wujud penyesuaian terhadap kebutuhan pasar tanpa mengabaikan nilai budaya yang terkandung dalam produk tersebut. Proses inovasi berkembang melalui pendidikan sosial dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah serta lembaga mitra seperti universitas dan LSM pendukung.

Dalam pandangan teori Ekonomi Kreatif berbasis Budaya (UNCTAD, 2022), inovasi yang berakar pada budaya tidak hanya berperan sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai cara untuk mempertahankan identitas lokal. Di Sorong Selatan, pelaku ekonomi kreatif menggunakan tradisi seperti pola etnis, tarian, dan upacara adat sebagai sumber ide yang meningkatkan nilai produk. Dengan cara ini, aktivitas ekonomi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan budaya serta meningkatkan daya saing produk di pasar domestik.

Namun, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas inovasi masih bersifat individual dan spontan, belum didukung oleh ekosistem inovasi yang solid. Fasilitas untuk riset dan pengembangan masih terbatas, dan tidak ada sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang memadai guna melindungi produk unggulan daerah. Sebagian pelaku usaha

juga mengeluhkan adanya penjiplakan desain dari luar daerah tanpa adanya prosedur hukum yang tegas. Hal ini menunjukkan kurangnya kekuatan dalam tata kelola inovasi lokal serta minimnya dukungan kebijakan untuk perlindungan budaya.

Berdasarkan teori *triple helix* yang diusulkan oleh Etzkowitz & Leydesdorff dalam Fidanoski et al. (2022), inovasi yang berkelanjutan memerlukan kerja sama antara pemerintah, sektor industri, dan dunia akademis. Dalam konteks Sorong Selatan, pola ini mulai terlihat dalam kerja sama antara pemerintah daerah dan universitas lokal dalam pelaksanaan pelatihan desain produk dan pemasaran digital. Namun, hubungan ini masih bersifat berbasis proyek dan belum menjadi sistem inovasi daerah yang tetap.

Walaupun begitu, dampak sosial dari inovasi ini tergolong cukup berarti. Sebagian besar pelaku ekonomi kreatif yang dulunya bergantung pada jual beli tradisional kini mulai memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan penjualan produk. Peningkatan literasi digital di antara pengrajin dan pelaku seni menunjukkan adanya transformasi sosial yang menguntungkan. Akan tetapi, rintangan seperti minimnya akses internet di daerah terpencil tetap menjadi tantangan utama dalam memperluas area pasar.

Oleh karena itu, inovasi ekonomi kreatif yang berlandaskan budaya lokal di Sorong Selatan telah membuktikan potensi signifikan untuk menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Agar mencapai keberlanjutan, perlu adanya penguatan ekosistem inovasi melalui dukungan institusi, kolaborasi antar aktor, dan kebijakan perlindungan budaya yang lebih jelas supaya inovasi bukan hanya wacana, tetapi menjadi praktik nyata yang kompetitif.

Peran Komunitas dan Lembaga Adat dalam Penguatan Ekonomi Kreatif Lokal

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat budaya dan organisasi adat memiliki peranan penting dalam mempertahankan kelangsungan ekonomi kreatif di Sorong Selatan. Mereka tidak hanya aktor budaya, tetapi juga penggerak utama dalam menghasilkan nilai ekonomi yang berakar dari tradisi. Di banyak situasi, lembaga adat berfungsi sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan aktivitas ekonomi yang berbasis budaya. Acara seperti festival budaya, pameran kerajinan, dan pertunjukan seni tradisional berfungsi sebagai tempat kolaborasi yang mengaitkan pelaku ekonomi dengan pasar serta pemerintah.

Peran lembaga adat ini dapat diuraikan melalui teori *community empowerment* oleh Perkins & Zimmerman dalam Istanti et al. (2025), yang menekankan pentingnya kemandirian komunitas lokal dalam mengatur sumber daya budaya dan ekonomi mereka. Di Sorong Selatan, pengembangan ekonomi kreatif yang berakar pada budaya tidak akan berhasil tanpa partisipasi

lembaga adat sebagai pelindung nilai dan norma sosial. Wawancara dengan pemimpin adat menunjukkan bahwa mereka memandang ekonomi kreatif bukan hanya sebagai kesempatan ekonomi, tetapi juga sebagai usaha untuk melestarikan martabat dan identitas suku-suku lokal.

Akan tetapi, penelitian juga mengidentifikasi tantangan dalam menggabungkan peran lembaga adat ke dalam kerangka kebijakan resmi. Sebagian pemimpin adat percaya bahwa birokrasi pemerintahan lokal sering kali kurang memahami mekanisme tradisional mereka, yang lebih mengutamakan musyawarah dan nilai-nilai kekeluargaan. Sebagai akibatnya, kerja sama antara pihak-pihak sering terhalang oleh perbedaan perspektif dan metode kerja.

Dalam pandangan teori *participatory governance* (McNulty & Wampler, 2015), keberhasilan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat adat bergantung pada sejauh mana partisipasi masyarakat diintegrasikan dalam kebijakan publik. Kasus di Sorong Selatan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat adat masih bersifat konsultatif, belum mencapai tahap ko-desain atau ko-produksi kebijakan. Akibatnya, sejumlah program ekonomi kreatif tidak berhasil mencapai tujuannya karena tidak sejalan dengan konteks budaya lokal.

Walaupun begitu, beberapa inisiatif lokal memperlihatkan pencapaian yang memotivasi. Sebagai contoh, kolaborasi antara institusi adat dan kelompok perajin wanita dalam pembuatan noken telah meningkatkan pendapatan rumah tangga serta memperkuat solidaritas di dalam komunitas. Program ini berfungsi sebagai model pemberdayaan yang mengandalkan nilai lokal namun tetap responsif terhadap pasar kontemporer.

Oleh karena itu, keterlibatan komunitas adat dan lembaga lokal adalah kunci sukses inovasi ekonomi kreatif yang berbasis budaya di Sorong Selatan. Pemerintah daerah harus menjadikan mereka sebagai rekan strategis di setiap tahap kebijakan, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Pendekatan partisipatif yang menghormati kearifan lokal akan memperkuat legitimasi serta efektivitas kebijakan ekonomi kreatif di masa depan.

Strategi Keberlanjutan dan Penguatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Temuan studi menunjukkan bahwa keberlanjutan program ekonomi kreatif di Sorong Selatan sangat ditentukan oleh kemampuan aktor lokal untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi dinamika pasar dan perubahan teknologi. Pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai inisiatif pelatihan tentang kewirausahaan, pengelolaan keuangan, dan pemasaran digital. Namun, banyak kegiatan yang masih bersifat sementara dan belum menciptakan sistem dukungan yang berkelanjutan.

Menurut teori pengembangan lokal berkelanjutan Zhydkov (2021), keberlanjutan ekonomi kreatif memerlukan integrasi antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks Sorong Selatan, pelaku usaha harus mengetahui cara mengelola sumber daya lokal

secara berkelanjutan sembari terus berinovasi dalam produk dan strategi pemasaran. Perajin yang memanfaatkan bahan hutan seperti kayu dan rotan mulai memahami betapa pentingnya melestarikan alam agar produksi mereka tidak merugikan lingkungan.

Di samping itu, temuan wawancara mengungkapkan bahwa sejumlah pelaku ekonomi kreatif masih mengalami kesulitan dalam mengelola usaha serta mendapatkan akses ke sumber pendanaan. Lembaga keuangan daerah belum memiliki rencana pembiayaan khusus untuk usaha kreatif yang berfokus pada budaya, sehingga banyak pelaku bisnis bergantung pada dana bantuan dari pemerintah. Sebenarnya, untuk mencapai keberlanjutan ekonomi, diperlukan model bisnis yang otonom dan terhubung dengan jaringan pasar yang lebih luas.

Menurut pandangan teori *capacity building* Zia et al. (2023), pengembangan kapasitas manusia menjadi landasan utama bagi pertumbuhan ekonomi kreatif. Pemerintah daerah harus meningkatkan pendidikan vokasional dan pelatihan yang berbasis praktik sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, kerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian dapat menjadi wadah untuk pengembangan inovasi produk dan strategi pemasaran yang lebih efisien.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pelaku ekonomi kreatif yang muda mulai mengambil peran signifikan dalam menghadirkan perubahan paradigma. Mereka menggunakan teknologi digital untuk memasarkan produk budaya lewat platform *e-commerce* dan media sosial. Fenomena ini menunjukkan munculnya generasi baru yang menggerakkan ekonomi kreatif dan dapat menghubungkan nilai-nilai tradisional dengan inovasi masa kini.

Oleh karena itu, keberlangsungan ekonomi kreatif di Sorong Selatan tidak hanya tergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat untuk terus belajar, berinovasi, dan bekerja sama. Strategi peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif perlu diterapkan secara bertingkat melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan intensif agar transformasi ekonomi yang berlandaskan budaya dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan daerah secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi pemberdayaan ekonomi kreatif yang berbasis budaya lokal di Kabupaten Sorong Selatan adalah strategi penting untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat adat, pelaku usaha setempat, dan pemerintah daerah dalam ekosistem kolaboratif dapat menghasilkan model pemberdayaan yang responsif terhadap potensi sumber daya lokal, seperti seni ukir, kain tradisional, dan kerajinan tangan khas Papua Barat Daya. Inovasi muncul tidak hanya sebagai produk yang kreatif, tetapi juga

dalam manajemen pemasaran digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan diversifikasi nilai dalam ekonomi kreatif. Program pelatihan dan inkubasi yang digagas oleh pemerintah daerah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya nilai ekonomi dari warisan budaya. Namun, penelitian ini mengungkapkan bahwa hambatan masih muncul dalam hal keberlanjutan pasar, kurangnya infrastruktur yang mendukung, dan rendahnya akses modal untuk pelaku usaha kreatif. Karenanya, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta untuk memperkuat sistem inovasi daerah yang berlandaskan budaya. Usulan yang diajukan adalah pentingnya pendirian pusat ekonomi kreatif daerah yang berperan sebagai inkubator gagasan dan produksi budaya lokal, serta memperluas jaringan pemasaran baik nasional maupun internasional untuk menjadikan Sorong Selatan sebagai contoh wilayah dengan model ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing tinggi berdasar kearifan lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Bernika, L., & Monika, A. K. (2024). Peran ekonomi kreatif terhadap perekonomian Indonesia selama pandemi dengan analisis tabel input-output. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(3), 249–271. <https://doi.org/10.52813/JEI.V13I3.344>
- Dushkova, D., & Ivlieva, O. (2024). Empowering communities to act for a change: A review of the community empowerment programs towards sustainability and resilience. *Sustainability (Switzerland)*, 16(19), 8700. <https://doi.org/10.3390/SU16198700/S1>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/JOPART/MUR011>
- Fidanoski, F., Simeonovski, K., Kaftandzieva, T., Ranga, M., Dana, L. P., Davidovic, M., Ziolo, M., & Sergi, B. S. (2022). The triple helix in developed countries: When knowledge meets innovation? *Helijon*, 8(8), e10168. <https://doi.org/10.1016/J.HELJON.2022.E10168>
- Huberman, A., & Miles, M. (2012). Understanding and validity in qualitative research. In *The Qualitative Researcher's Companion*. <https://doi.org/10.4135/9781412986274.n2>
- Huybrechts, B., & Nicholls, A. (2013). The role of legitimacy in social enterprise-corporate collaboration. *Social Enterprise Journal*, 9(2), 130–146. <https://doi.org/10.1108/SEJ-01-2013-0002>
- Istanti, E., Nuroini, I., & Negoro, R. M. B. K. (2025). Merancang strategi digitalisasi UMKM desa: Pendekatan partisipatif di Desa Terik, Sidoarjo. *Semeru: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 178–187. <https://doi.org/10.55499/SEMERU.V2I1.1547>
- Kaliele, R., Kalangi, J. B., & Tumangkeng, S. Y. L. (2022). Analisis sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Sorong Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(1).
- Khumair, M., & Yazid, M. (2025). Analisis peran ekonomi kreatif dalam pemberdayaan masyarakat lokal: Studi literatur kualitatif terhadap perkembangan industri kreatif di

- Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 3(3), 156–169. <https://doi.org/10.61896/JEKI.V3I3.115>
- Kusumaningrum, D. N., Prasetya, D. M., & Novin, F. S. W. (2024). Unveiling creative economy resilience in Indonesia amidst the global pandemic. *Innovation in the Social Sciences*, 2(1), 86–118. <https://doi.org/10.1163/27730611-BJA10022>
- Lestari, A., Syahrul, & Rokhimah. (2022). Pengembangan ekonomi kreatif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Matawolot Kab. Sorong. *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi*, 2(2), 181–193. <https://doi.org/10.47945/AT-THARIQAH.V2I2.753>
- Mahardhani, A. J. (2023). Pemerintahan kolaboratif (menjawab tantangan masa depan). *Literasi Nusantara*.
- Mahardhani, A. J. (2024). Navigating the complexities: Assessing governance mechanisms for inter-regional cooperation. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 51–63. <https://doi.org/10.26618/OJIP.V14I1.12652>
- Mahardhani, A. J., Suwitri, S., Zauhar, S., & Purnaweni, H. (2021). Regional cooperation of development in local government (Case in the Province of East Java, Indonesia). *STED Journal: Journal of Social and Technological Development*, 3(1). <https://doi.org/10.7251/STED2101030J>
- Maruapey, A., Saeni, F., Lestaluhu, R., Saeni, A., & Suaib, M. R. (2023). Kearifan lokal dan sosial budaya suku Maybrat dalam membuat Koba-Koba (Am) sebagai produk benda budaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 217–225. <https://doi.org/10.33506/JN.V9I1.2978>
- Masri, M. (2025). Strategi pengembangan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Sikka. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, 8(1), 49–62. <https://doi.org/10.33005/JDEP.V8I1.722>
- McNulty, S. L., & Wampler, B. (2015). Participatory governance. *Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences*, 1–14. <https://doi.org/10.1002/9781118900772.ETRDS0248>
- Nidarmawati. (2025). Dampak ekonomi kreatif terhadap peningkatan PDB dan penyerapan tenaga kerja. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(3), 22–27. <https://doi.org/10.70134/JUKONI.V2I3.823>
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. D., Saputra, D. N., Mardianto, D., & Mahardhani, A. J. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. *Pradina Pustaka*.
- Putra, I. J. (2023). Strategi ketahanan untuk keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam perspektif syariah di Kota Solok. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(02). <https://doi.org/10.30868/AD.V7I02.5122>
- Rosyadi, S., Sabiq, A., Ahmad, A. A., & Nuryanti. (2022). The Indonesian government capacity in responding to the COVID-19 impacts on the creative economy sector. *SAGE Open*, 12(2). <https://doi.org/10.1177/21582440221105820>
- Sanuri, S. (2020). Pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal masyarakat dengan pendekatan outcome mapping. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 7(2), 101–114. <https://doi.org/10.21831/JPPM.V7I2.24870>
- Song, R., Moon, S., Chen, H. (Allan), & Houston, M. B. (2018). When marketing strategy meets culture: The role of culture in product evaluations. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 46(3), 384–402. <https://doi.org/10.1007/S11747-017-0525-X>

- Sururi, A. (2016). Inovasi kebijakan publik (Tinjauan konseptual dan empiris). *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 4(3). <https://doi.org/10.30656/SAWALA.V4I3.241>
- Syaifuddin, E. R., & Umam, S. (2022). Papua: Surga industri kreatif berbasis budaya (Studi kasus industri kreatif Noken, lukisan ludah pinang dan papeda). *DESKOVI: Art and Design Journal*, 5(2), 94. <https://doi.org/10.51804/DESKOVI.V5I2.1618>
- Widiawati, S., Mahardhani, A. J., Cahyono, H., Sulton, S., & Nasution, I. F. (2023). Collaborative governance in fulfilling the right to education for children of non-document migrant workers in Malaysia. *Journal of Governance*, 8(2). <https://doi.org/10.31506/JOG.V8I2.19207>
- Zhydkov, K. S. (2021). Sustainable local development: Essence and content. *Theory and Practice of Public Administration*, 2(73), 120–127. <https://doi.org/10.34213/TP.21.02.13>
- Zia ud din, M., Yuan yuan, X., Khan, N. U., & Han, H. (2023). Linking local collaborative governance and public service delivery: Mediating role of institutional capacity building. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.1057/S41599-023-02421-3>